



RSUD DOLOPO

RSUD DOLOPO

KABUPATEN MADIUN

LAPORAN KINERJA

2022



TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS

RSUD Dolopo
telah Terakreditasi PARIPURNA

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas implementasi program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2022, disusunlah buku Laporan Kinerja 2022 RSUD Dolopo Kabupaten Madiun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun sepanjang tahun 2022.

Laporan Kinerja ini berisi gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategi yang dilaksanakan tahun 2022 dan merupakan capaian kinerja pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis RSUD Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023. Banyak hal yang telah dicapai dalam kurun waktu satu tahun dalam kaitannya dengan Rencana Strategis, namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan ke depan yang perlu diselesaikan. Untuk itu diperlukan komitmen dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan daerah secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi oleh seluruh jajaran di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun.

Kiranya laporan ini dapat menjadikan masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya dan diikuti dengan peningkatan kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran RSUD Dolopo Kabupaten Madiun sebagai salah satu wujud pengabdian kepada bangsa dan negara.

Madiun, 27 Februari 2023
Direktur RSUD Dolopo
Kabupaten Madiun



Dr. PURNOMO HADI
NIP. 19750907 200902 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja RSUD Dolopo Kabupaten Madiun merupakan salah satu media penyampaian pertanggungjawaban kinerja Direktur kepada Bupati Madiun dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan Kinerja RSUD Dolopo tahun 2022 ini secara garis besar berisikan informasi rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2022, mengacu pada tugas pokok, fungsi dan Perubahan Rencana Strategis RSUD Dolopo tahun 2018-2023. Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis tahun 2018-2023, RSUD Dolopo telah menetapkan Sasaran yaitu “Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit” dengan Indikator Kinerja “Prosentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit”. Pencapaian target sasaran kinerja sebesar 100% dari target SPM 96,67% realisasinya SPM 96,67%. SPM Rumah Sakit sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 tahun 2008 memiliki 90 indikator standar pelayanan yang harus dicapai, di tahun 2022 ada 3 indikator yang belum terpenuhi oleh RSUD Dolopo yaitu Kepuasan pelanggan pada Pelayanan Instalasi Gawat Darurat, Kematian pasien >48 jam pada Pelayanan Rawat Inap dan Pertolongan Persalinan melalui Seksio Cesaria pada Pelayanan Persalinan, Perinatologi dan Neonatologi.

Pencapaian pendapatan RSUD Dolopo pada tahun 2022 sebesar Rp.115.157.350,640,29 (104,69 %) dari target yang ditetapkan sebesar Rp.110.000.000.000,00. Realisasi penyerapan belanja per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.155.368.349.682,00 (85,71%) dari pagu anggaran sebesar Rp.181.270.855.005,00. Sumber daya manusia yang dimiliki RSUD Dolopo pada tahun 2022 terdiri dari pegawai PNS, PPPK dan Non PNS sebanyak 386 orang. RSUD Dolopo saat ini memiliki 36 orang tenaga medis, 134 orang perawat, 36 orang bidan, 75 orang tenaga kesehatan lainnya dan 105 orang tenaga non medis & administrasi.

I. PENDAHULUAN	
A. Struktur Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Isu Strategis.....	2
D. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi.....	
II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	6
B. Rencana Kerja Tahun 2022	9
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
B. Analisa Penggunaan Anggaran	33
C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.....	
IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	34
B. Saran.....	34

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Laporan Hasil Evaluasi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran & Strategi RSUD Dolopo	8
Tabel 2. Struktur Standar Pelayanan Minimal RSUD Dolopo	9
Tabel 3. Indikator Kinerja Utama RSUD Dolopo.....	10
Tabel 4. Capaian Kinerja RSUD Dolopo Tahun 2022	28
Tabel 5. Indikator SPM yang Belum Tercapai di Tahun 2022	29
Tabel 6. Realisasi SPM per Bidang.....	30
Tabel 7. Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sejarah RSUD Dolopo	1
Gambar 2. IGD Covid-19 yang Terpisah dengan IGD Umum.....	4
Gambar 3. Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur	4
Gambar 4. Sertifikat Akreditasi RSUD Dolopo	5
Gambar 5. Keterkaitan Rencana Strategis RSUD Dolopo dengan RPJMD Kabupaten Madiun Sebelum Perubahan.....	7
Gambar 6. Keterkaitan Rencana Strategis RSUD Dolopo dengan RPJMD Kabupaten Madiun Sebelum Perubahan.....	7
Gambar 7. Perjanjian Kinerja Direktur RSUD Dolopo	11

BAB I PENDAHULUAN

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dasar hukum yang menjadi acuan penyusunan laporan kinerja adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Madiun Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

Sistematika Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah :

I. PENDAHULUAN

- A. Struktur Organisasi
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kerja Tahun 2022

III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Analisa Penggunaan Anggaran
- C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Laporan Hasil Evaluasi

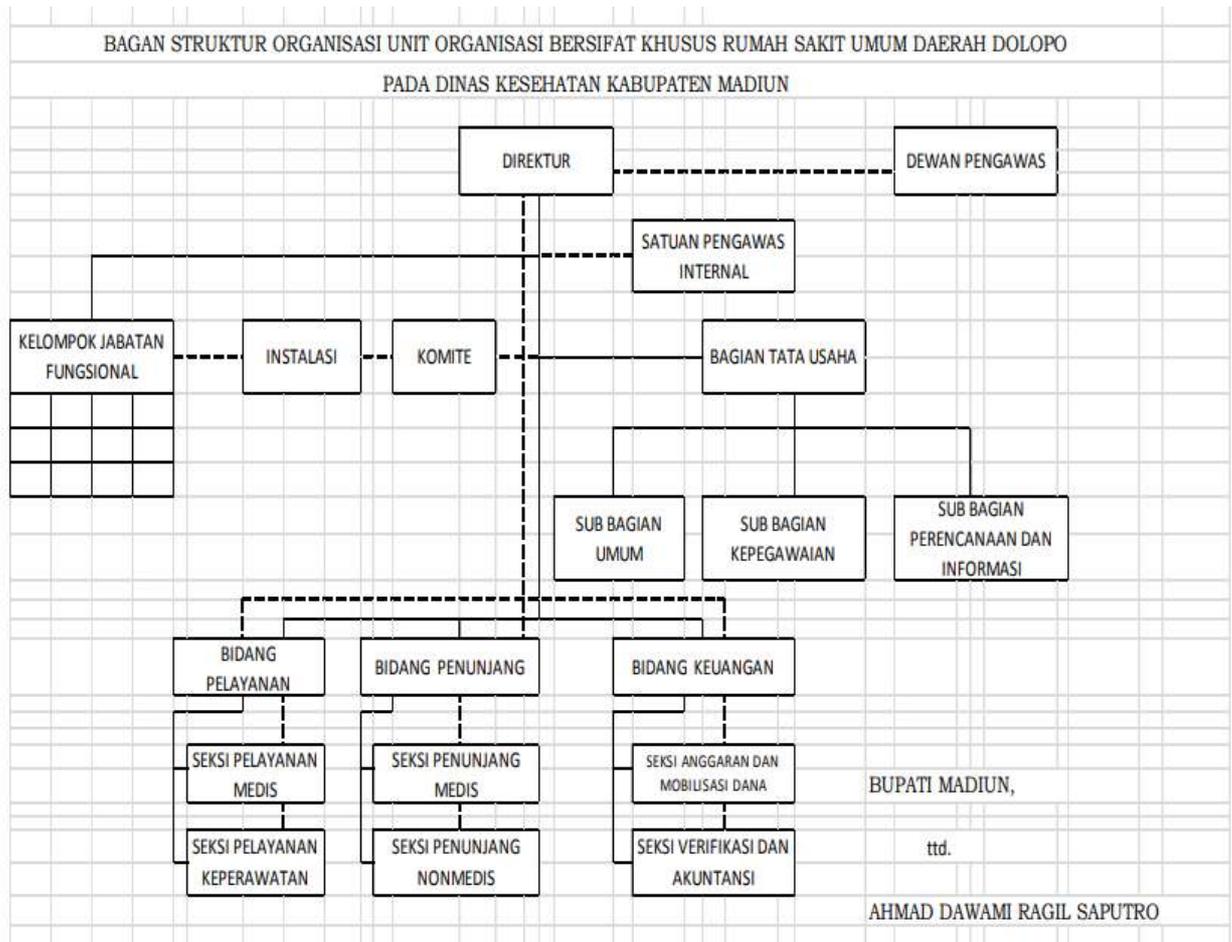
A. Struktur Organisasi

RSUD Dolopo mulai berdiri sejak tahun 2010 berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/318/KPTS/402.031/2010 tentang Peningkatan Puskesmas Perawatan Plus Dolopo menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dolopo Kabupaten Madiun. Pada tahun 2015 berhasil mendapatkan izin operasional tetap sebagai Rumah Sakit Kelas C dari Bupati Madiun Nomor 445/2439/402.102/2015 tanggal 7 September 2015 dan diperpanjang pada tahun 2020 Nomor 503/02/402.106/2020 tanggal 18 September 2020.

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun pada Pasal 3 ayat (1) Susunan organisasi RSUD Dolopo terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Direktur;
- c. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Informasi;
- d. Bidang Pelayanan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Medis; dan
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan;
- e. Bidang Penunjang, membawahi :
 1. Seksi Penunjang Medis; dan
 2. Seksi Penunjang Non Medis;

- f. Bidang Keuangan, membawahi :
 1. Seksi Anggaran dan Mobilisasi Dana; dan
 2. Seksi Verifikasi dan Akuntansi;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Komite;
- i. Satuan Pengawas Internal;
- j. Instalasi.



B. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi RSUD Dolopo berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun pada Pasal 5 ayat (1) pelaksanaan tugas bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangannya serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh

Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi berdasarkan Pasal 5 ayat (2) adalah :

- a. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan medis, penunjang medis, penunjang non medis, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medis, penunjang medis, penunjang non medis, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, Pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keehatan yang meliputi pelayanan medis, penunjang medis, penunjang nonmedis, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medis, penunjang medis, penunjang nonmedis, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
- e. Pengoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan RSUD Dolopo maupun instansi-instansi di luar sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- f. Pengendalian, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan, pengembangan, pengawasan serta mengevaluasi pelaksana tugas di lingkungan RSUD Dolopo dan menyampaikan laporan kinerja;
- g. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pelayanan medis, penunjang medis, penunjang nonmedis, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medik, penunjang medik, penunjang nonmedis, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan

- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Isu Strategis

Untuk dapat bersaing dalam bidang jasa pelayanan kesehatan menuntut rumah sakit untuk selalu berbenah dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Ada beberapa isu-isu strategis yang mengharuskan untuk melakukan langkah-langkah konstruktif. Adapun isu-isu tersebut adalah :

1. Adanya pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kebijakan belanja dan pendapatan dalam rangka memenuhi pelayanan untuk pasien Covid-19 serta standar pelayanan yang semakin tinggi.
2. Adanya perubahan tuntutan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, cepat dan manusiawi.
3. RSUD Dolopo saat ini masih dalam klasifikasi sebagai Rumah Sakit Tipe C dan sedang berproses dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan agar sesuai dengan standar Rumah Sakit Tipe C.
4. Informasi pelayanan publik yang transparan dan akuntabel merupakan tuntutan publik yang dijamin oleh undang-undang sekaligus sebagai kewajiban instansi pemerintah.
5. Bertambahnya badan usaha pemberi layanan kesehatan baik rumah sakit maupun klinik baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
6. Ada ancaman pasar bebas ASEAN (MEA) yang mengharuskan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan.
7. Kebijakan pemerintah tentang JKN dan system rujukan yang mulai diterapkan tahun 2014, dimana dalam rangka ikut serta dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien BPJS perlu adanya upaya pemenuhan persyaratan dan kualifikasi dari fasilitas pelayanan.

D. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP nomor 790/1763/402.060/2022 tanggal 1 Agustus 2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada RSUD Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2021, ada simpulan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti sebagai berikut :

a. Simpulan

Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada keseluruhan komponen menunjukkan bahwa RSUD Dolopo Kabupaten Madiun telah memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.

b. Rekomendasi

1. Menyajikan data hambatan, rekomendasi dan solusi atau Langkah perbaikan ke depan yang diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada dokumen evaluasi internal triwulan I tahun 2022
2. Menyajikan data perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai 2021 pada dokumen laporan kinerja 2021.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Visi Bupati Madiun adalah “**Terwujudnya Kabupaten Madiun AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA dan BERAKHLAK**”.

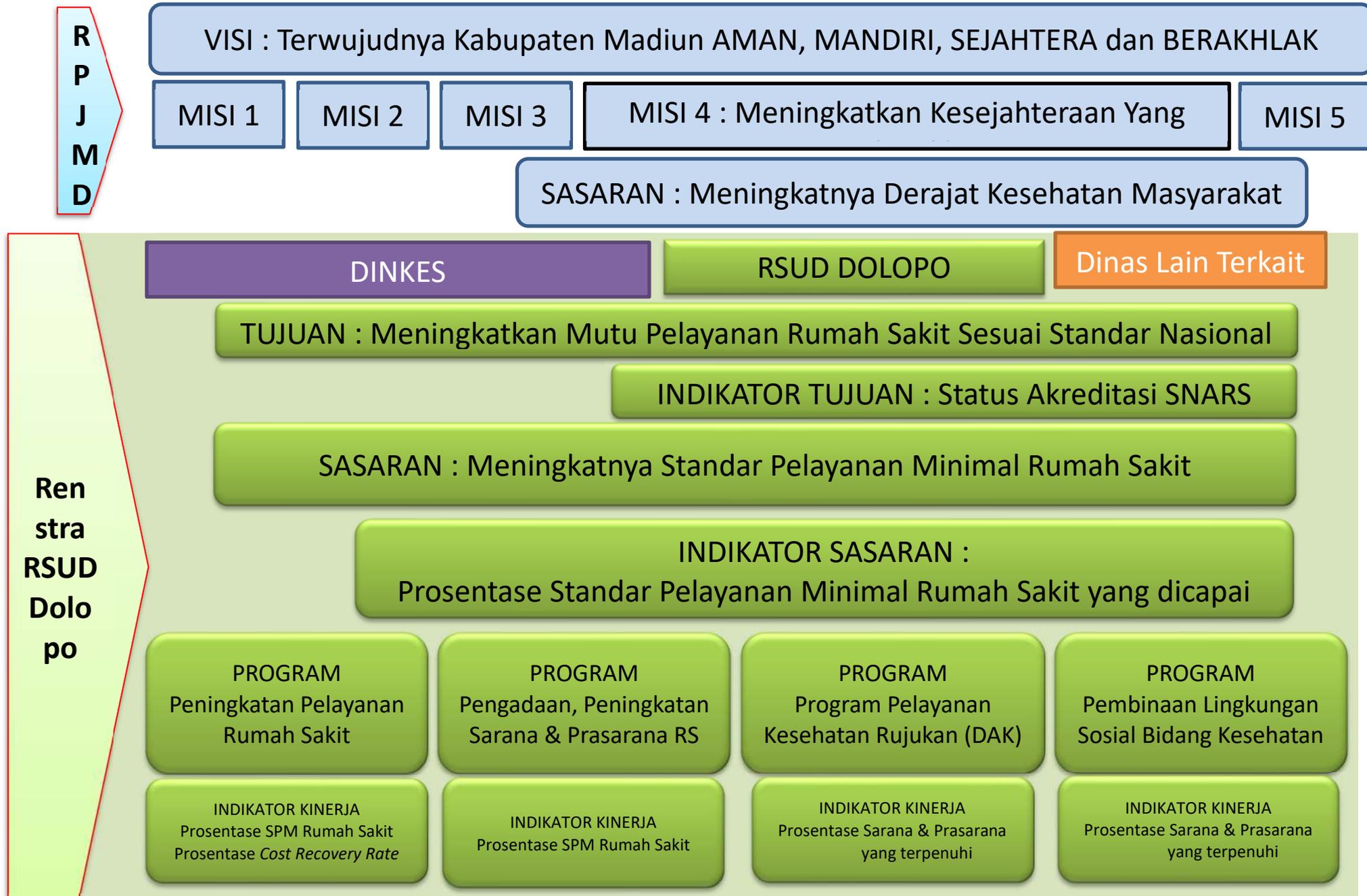
Adapun misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi rumah sakit yaitu **misi keempat** yaitu “**Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan**”.

Pada RPJMD sebelum perubahan sasarannya adalah “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” dan pada RPJMD Perubahan sasarannya menjadi “Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan”.

RSUD Dolopo sesuai dengan tugas dan fungsinya merumuskan tujuannya yaitu “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan” dengan indikator tujuan indeks kesehatan, dimana pada rencana strategis sebelum perubahan tujuannya adalah “Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit sesuai standar nasional” dengan indikator tujuannya status akreditasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut sasarannya adalah “Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit”.

Dengan tujuan dan sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo tersebut diharapkan dapat mempercepat tujuan dan visi Kabupaten Madiun, khususnya di misi ke empat.



Gambar 5. Keterkaitan Rencana Strategis RSUD Dolopo dengan RPJMD Kabupaten Madiun **Sebelum Perubahan**



Gambar 6. Keterkaitan RenStra Perubahan RSUD Dolopo dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Madiun **Setelah Perubahan**

Target indikator tujuan dan sasaran dari tahun 2019 – 2023, berdasarkan RPJMD Perubahan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam rencana strategis RSUD Dolopo ada penyesuaian pada tujuan yang ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	TUJUAN Sebelum Perubahan Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Standar Nasional	Status Akreditasi Rumah Sakit	Madya	Madya	Madya	Utama	Utama
	Setelah Perubahan Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,78	0,78	0,79	0,80	0,80
2	SASARAN Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Prosentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	86.67%	92.22%	94.44%	96.67%	97.78%

Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi dan kebijakan untuk lebih menajamkan arah sasaran sehingga bisa dicapai secara efektif dan efisien.

Tabel 1. Sasaran & Strategi RSUD Dolopo

SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Prosentase pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas unit/ruang/instalasi dalam pembuatan perencanaan unit/ruang/instalasi masing-masing - Penentuan indikator standar pelayanan minimal di tiap unit/ruang/instalasi - Monitoring dan evaluasi standar pelayanan di unit/ruang/instalasi dilakukan berkala - Monitoring kepatuhan unit/ruang/instalasi terhadap regulasi dengan <i>tools</i> elemen penilaian akreditasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan bangunan rumah sakit yang sesuai standar - Pemenuhan alat kesehatan dan prasarana lainnya sesuai dengan prioritas - Pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan - Pengembangan pelayanan rumah sakit dengan analisa preferensi kebutuhan masyarakat - Pengajuan usulan anggaran bersumber APBN dan sumber lain yang sah untuk percepatan pemenuhan fisik bangunan dan alat kesehatan. - Pengelolaan pola keuangan BLUD dengan prinsip efektif dan efisien

Tahun 2022 adalah tahun ke empat periode Rencana Strategis 2018-2023, capaian indikator tujuan dan sasaran selama tiga tahun sebelumnya di dalam tabel sebagai berikut.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	2019		2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	TUJUAN Sebelum Perubahan Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit sesuai standar nasional	Status Akreditasi Rumah Sakit	Madya	Perdana	Madya	Perdana	Madya	Perdana	Utama	Paripurna
	Setelah Perubahan Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	Indeks Kesehatan	---	---	---	---	0,79	0,792	0,80	0,798
2	SASARAN Meningkatnya standar pelayanan minimal rumah sakit	Prosentase pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit	86,67	86,67	92,22	93,33	94,44	95,56	96,67	96,67

Indikator tujuan sebelum perubahan tingkat status akreditasi pada tahun 2019 tidak tercapai dan akan dicapai pada tahun 2020 namun dengan adanya pandemi covid-19, dari lembaga akreditasi KARS memberhentikan survei akreditasi sampai tahun 2022. Pada tahun 2022 RSUD Dolopo dilakukan survei akreditasi oleh KARS dengan hasil status akreditasi Paripurna. Meskipun tingkat status akreditasi tidak lagi menjadi indikator tujuan, komitmen RSUD Dolopo tetap memberikan pelayanan yang berkualitas dengan cara meningkatkan status akreditasinya.

Setelah adanya perubahan rencana strategis pada tahun 2021, indikator tujuan berubah menjadi indeks kesehatan dengan target 0,79 dan realisasinya 0,792 sedangkan pada tahun 2022 dengan target 0,80 realisasinya 0,798 masih ada gap 0,002 point untuk mencapai target.

Indikator sasaran yaitu prosentase pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit masih tetap di rencana strategis sebelum perubahan maupun rencana strategis setelah perubahan. Capaian selama empat tahun periode rencana strategis ini, RSUD Dolopo berhasil selalu mencapai target.

B. RENCANA KERJA 2022

Tabel T-C. 33
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
 Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur

Nama Perangkat Daerah : RSUD Dolopo

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	Kesehatan								
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Prosentase Cost Recovery Rate	RSUD Dolopo	75%	39.152.696.655			80%	39.600.000.000
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji ASN	RSUD Dolopo	1 Tahun	8.539.696.655	DAU		1 Tahun	8.600.000.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya operasional pelayanan dan pendukung pelayanan	RSUD Dolopo	1 Tahun	30.613.000.000	BLUD		1 Tahun	31.000.000.000
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tercapainya Prosentase Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	RSUD Dolopo	100%	13.711.703.450			100%	28.500.000.000
1.02.02.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.01.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya prasarana rumah sakit	RSUD Dolopo	1 Paket prasarana	2.500.000.000	IID		1 Paket prasarana	5.000.000.000
1.02.02.01.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Terpenuhinya gedung rumah sakit sesuai masterplan	RSUD Dolopo	1 Gedung	7.711.703.450	DAK		1 Gedung	15.000.000.000
1.02.02.01.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya alat kesehatan rumah sakit	RSUD Dolopo	1 Paket Alat Kesehatan	1.000.000.000	DAK		1 Paket Alat Kesehatan	5.000.000.000
1.02.02.01.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya sarana fasilitas rumah sakit	RSUD Dolopo	1 Paket Alat Kesehatan	2.500.000.000	CUKAI		1 Paket Alat Kesehatan	3.500.000.000

Kebijakan rencana kerja tahun 2022 diambil dari rencana strategis dengan menyesuaikan anggaran yang ada berdasarkan prioritas yang harus dipenuhi pada tahun 2022.

Untuk operasional pelayanan dipenuhi dari anggaran pendapatan BLUD dan anggaran Non BLUD difokuskan untuk pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang merupakan prioritas utama dari RSUD Dolopo sebagai rumah sakit yang berkembang dari Puskesmas.

Dalam proses penganggaran selanjutnya melalui proses dengan legislatif ada penyesuaian-penyesuaian berdasarkan pertimbangan dan kemampuan anggaran daerah yang disajikan dalam rekapitulasi RKA 2022 sebagai berikut :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir RKA-BELANJA SKPD					
Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022															
Organisasi : 1.02.000.00.03.0000 RSUD Dolopo															
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jumlah					15	
									T-1	T					T+1
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
										10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				82.583.811.106	14.159.732.737	0	0	0	96.743.543.843	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				82.282.696.655	9.000.000.000	0	0	0	91.282.696.655	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.169.696.655	0	0	0	0	10.169.696.655	
1	02	01	2.02	01	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD Dolopo)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari		10.169.696.655	0	0	0	0	10.169.696.655	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				72.113.000.000	9.000.000.000	0	0	0	81.113.000.000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Pemungut Pelayanan BLUD (RSUD Dolopo)	Pendapatan dari BLUD	Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari		72.113.000.000	9.000.000.000	0	0	0	81.113.000.000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				201.114.451	5.159.732.737	0	0	0	5.360.847.188	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawenangan Daerah Kabupaten/Kota				201.114.451	5.159.732.737	0	0	0	5.360.847.188	
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Dolopo)	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rutin	Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari		20.574	1.199.973.426	0	0	0	1.200.000.000	
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Dolopo)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari		200.474.258	2.298.525.742	0	0	0	2.500.000.000	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemungut Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Dolopo)	DBH CHT	Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari		615.619	1.660.233.569	0	0	0	1.660.847.188	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (RSUD Dolopo)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000	0	0	0	100,000,000	

Pada RKA 2022 anggaran belanja RSUD Dolopo menjadi Rp.96.743.543.843 hal ini naik sebesar Rp.43.879.147.738 dibandingkan pada belanja di Rencana Kerja, hal ini karena adanya amanat dari legislatif untuk meningkatkan pendapatan BLUD dai 30 Milyar menjadi 81 Milyar.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penetapan Kinerja organisasi berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2022 RSUD Dolopo dipresentasikan dalam Perjanjian Kinerja Direktur sebagai berikut :



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RSUD DOLOPO
KABUPATEN MADIUN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berintegritas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. PURNOMO HADI

Jabatan : DIREKTUR RSUD DOLOPO KABUPATEN MADIUN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Jabatan : BUPATI MADIUN

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik periode per tahun maupun lima tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI MADIUN



H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Madiun, Januari 2022
Pihak Pertama,
DIREKTUR RSUD DOLOPO
KABUPATEN MADIUN



Dr. PURNOMO HADI
Peribina
NIP. 19750907 200902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RSUD DOLOPO
KABUPATEN MADIUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya standar pelayanan minimal	Prosentase Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang dicapai	96,67 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 10.169.696.655,00	DAU
	- Peningkatan pelayanan BLUD	Rp. 81.113.000.000,00	BLUD
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
	- Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Rp. 1.200.000.000,00	DAK Fisik
	- Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp. 2.500.000.000,00	Dana Bagi Hasil
	- Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Rp. 1.660.847.188,00	DBHCHT
3	Program Peningkatan Sumber daya Manusia Kesehatan		
	- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Rp. 100.000.000,00	DAU
JUMLAH		Rp. 96.743.543.843,00	

Pihak Kedua
BUPATI MADIUN



H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Madiun, Januari 2022
Pihak Pertama,
DIREKTUR RSUD DOLOPO
KABUPATEN MADIUN



Dr. PURNOMO HADI
M A D Pembina
NIP. 19750907 200902 1 001

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 jumlah anggaran kegiatan RSUD Dolopo sebesar Rp. 96.743.543.843 diharapkan bisa memenuhi capaian kinerja untuk sasaran strategis yaitu prosentase standar pelayanan minimal yang dicapai yaitu 96,67%.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN-APBD TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOPO
KABUPATEN MADIUN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. PURNOMO HADI
Jabatan : DIREKTUR RSUD DOLOPO KABUPATEN MADIUN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos
Jabatan : BUPATI MADIUN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik periode per tahun maupun lima tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 20 Oktober 2022

Pihak Kedua
BUPATI MADIUN

H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Pihak Pertama,
DIREKTUR RSUD DOLOPO
KABUPATEN MADIUN



Dr. PURNOMO HADI
Pembina
NIP. 19750907 200902 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN-APBD TAHUN ANGGARAN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOPO
KABUPATEN MADIUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya standar pelayanan minimal	Prosentase Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang dicapai	96,67 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Peningkatan pelayanan BLUD	Rp. 11.550.946.659 Rp. 127.783.523.459	DAU BLUD
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp. 1.200.000.000 Rp. 37.530.000.000 Rp. 2.792.456.313	DAK PAD DBHCHT
3	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota - Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Rp. 413.928.574	DAU
JUMLAH		Rp. 181.270.855.005	

Pihak Kedua
BUPATI MADIUN

H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Madiun, 20 Oktober 2022

Pihak Pertama,
DIREKTUR RSUD DOLOPO
KABUPATEN MADIUN



Dr. PURNOMO HADI
Pembina
NIP. 19750907 200902 1 001

Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 anggaran belanja menjadi Rp.181.270.855.005 dari Rp.96.743.543.843 ada peningkatan sebesar Rp.84.527.311.162. Peningkatan yang cukup besar dari anggaran BLUD sebesar Rp.46.670.523.459 dari pendapatan BLUD untuk pemenuhan operasional pelayanan dan Rp.35.000.000.000 dari SiLPA BLUD Tahun 2021 untuk pembangunan 3 unit Gedung Rawat Inap.

B. ANALISA PENGGUNAAN ANGGARAN

Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya standar pelayanan minimal rumah sakit	Prosentase standar pelayanan minimal rumah sakit yang dicapai	96,67%	96,67%	100%
Target indikator kinerja adalah target kinerja untuk satu tahun.				
PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI	CAPAIAN %	
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 11.550.946.659,00	Rp 11.277.544.792,00		97,63%
JUMLAH	Rp 11.550.946.659,00	Rp 11.277.544.792,00		97,63%
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD				
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp 127.783.523.459,00	Rp 105.964.245.816,00		82,92%
JUMLAH	Rp 127.783.523.459,00	Rp 105.964.245.816,00		82,92%
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK)	Rp 1.200.000.000,00	Rp 1.191.357.760,00		99,28%
Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 37.530.000.000,00	Rp 33.836.771.740,00		90%
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 2.792.456.313,00	Rp 2.784.501.000,00		100%
JUMLAH	Rp 41.522.456.313,00	Rp 37.812.630.500		91,07%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp 413.928.574,00	Rp 313.928.574,00		75,84%
JUMLAH	Rp 413.928.574,00	Rp 313.928.574,00		75,84%

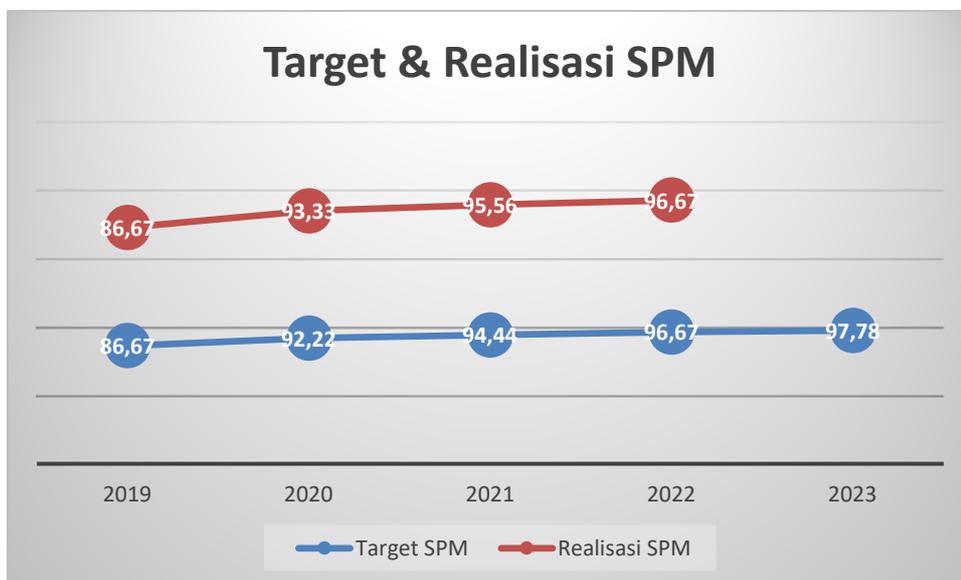
Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp.155.368.349.682 dengan prosentase 85,71% dari total anggaran belanja Rp.181.270.855.005 dan sisa anggaran Rp.25.902.505.323. Sisa anggaran tersebut sebagian besar merupakan efisiensi dari belanja operasional pelayanan BLUD sebesar Rp.21.819.277.643 dan sisanya merupakan selisih nilai kontrak dengan pagu anggaran dari kegiatan Non BLUD.

Tabel 4. CAPAIAN KINERJA RSUD DOLOPO TAHUN 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian thd. Akhir Renstra
					Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.	Prosentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.	95,56%	96,67%	96,67%	100%	97,78%	97,78%

Realisasi SPM tahun 2022 adalah 96,67% dari 90 indikator yang terpenuhi 87 indikator, target 2022 adalah 96,67% jadi capaian SPM tahun 2022 adalah 100% masuk kategori hijau karena sudah mencapai 100%. Unit-unit yang belum bisa memenuhi SPM di tahun 2022 adalah :

- Instalasi Rawat Jalan (83,33%)
- Instalasi Rawat Inap (90,90%),
- Pelayanan Persalinan, Perinatologi dan Neonatologi (83,33%)



Target dan Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pada tahun 2019-2022 capaian target SPM RSUD Dolopo diatas target SPM dan setiap tahun ada kenaikan target. Hal tersebut karena optimalisasi semua sumber daya dan koordinasi yang baik dari tingkat manajerial sampai pelaksana teknis di pelayanan. Target pada tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir rencana strategis sebesar 97,78%.

Realisasi Tahun 2022 Dibanding Renstra

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2022 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra RSUD Dolopo Tahun 2018 – 2023, maka secara keseluruhan capaian realisasi SPM tahun 2022 sebesar 96,67 % sebanding dengan target yang tertuang di Renstra untuk tahun 2022 adalah 96,67 %. Terpenuhinya target tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti sarana dan prasarana yang semakin memadai, pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan SOP, dan kualitas SDM yang semakin baik. Diharapkan pada akhir periode Renstra, target semua indikator dapat dicapai 97,78%

Analisis Penyebab Kegagalan/Keberhasilan Atau Kenaikan/Penurunan

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap indikator SPM, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang meliputi penjelasan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya – upaya yang dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya.

Pencapaian kinerja untuk sasaran pada tahun 2022 belum semuanya memenuhi target. Sehingga dapat dikatakan bahwa predikat kinerja secara umum terkategori sedang.

Adapun beberapa **pendukung dari keberhasilan** tersebut antara lain:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing – masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan pada awal tahun 2022;
2. Perencanaan dari masing – masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan;
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan dapat mendukung pelayanan untuk mencapai standar pelayanan minimal.

Selain terdapat penyebab yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun **penyebab kegagalan** dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

1. Indikator kepuasan pelanggan instalasi rawat jalan belum mencapai target $\geq 90\%$. Dari hasil survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, diketahui bahwa hal ini disebabkan oleh factor ruang tunggu dan ruang poliklinik yang masih menggunakan gedung lama bekas Puskesmas dengan kondisi yang sangat terbatas dan kurang layak.
2. Kematian pasien >48 jam pada instalasi rawat inap melebihi target $\leq 0,24\%$. Hal ini disebabkan oleh adanya pasien meninggal sebanyak 12 pasien setelah rawat inap >48 jam dari 1.346 pasien. Hal ini dipengaruhi oleh mayoritas pasien yang meninggal dengan diagnose *Coronavirus Infection*.
3. Pertolongan Persalinan Perinatologi dan Neonatalogi melalui section secaria belum memenuhi target yaitu $\leq 20\%$. Hal ini dikarenakan pasien yang melahirkan di RSUD Dolopo merupakan pasien rujukan dari pelayanan kesehatan primer (Puskesmas dan Klinik) dengan riwayat penyulit yang relative berat untuk menurunkan persentase persalinan section secaria

Langkah- langkah yang diperlukan untuk **mengatasi masalah** tersebut adalah:

1. Pada tahun 2023 melanjutkan pembangunan.
2. Melengkapi fasilitas di gedung baru agar sesuai standard an bisa digunakan untuk pelayanan pasien.
3. Untuk menurunkan persentase persalinan section cesaria rencana tindakan yang dilakukan adalah koordinasi dengan Puskesmas dan Klinik untuk bersama- sama mengedukasi calon ibu hamil agar bisa mempersiapkan kehamilan serta melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Analisa Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 3 program dan 4 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 139.334.470.118,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp.

117.241.790.608,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 84,14%, yang diarahkan untuk gaji ASN, Insentif Nakes ASN, dan belanja operasional rumah sakit.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 41.522.456.313,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 37.812.630.500,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 91,07%, yang diarahkan untuk belanja alat kedokteran umum, gedung CSSD, tabir Pb, HFNC, laparotomy instrument set, ECG System Conte 8000s.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 413.928.574,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp.313.928.574,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 75,84%, yang diarahkan untukbelanja jasa tenaga kesehatan.

Efisiensi pada tahun anggaran 2022 RSUD Dolopo sebesar Rp.25.902.505.323 dari alokasi anggaran sebesar Rp.181.270.855.005,00.direalisasikan Rp.155.368.349.682 Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja Langsung Urusan Wajib Pelayanan Kesehatan Dasar yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 4 Kegiatan. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :

Tabel 7. Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

no.	Sasaran	Indikator Tahun 2022			Anggaran Tahun 2022						Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian	
1.	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	96,67%	96,67%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.550.946.659	11.277.544.792	273.401.867	97,63%	Efisien
						Peningkatan Pelayanan BLUD	127.783.523.459	105.964.245.816	21.819.277.643	82,92%	Efisien
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	41.522.456.313	37.812.630.500	3.709.825.813	91,07%	Efisien
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan)	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	413.928.574	313.928.547	100.000.027	75,84%	Efisien

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Tindak lanjut dari hasil evaluasi implementasi SAKIP 2021 adalah :

1. Menganalisa terkait faktor pendorong, faktor penghambat dan tindak lanjut pada evaluasi internal setiap triwulan.
2. Menyajikan data perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai 2022 pada laporan kinerja.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Untuk pengukuran keseluruhan Kinerja Sasaran di RSUD Dolopo, dari 90 indikator sasaran SPM, 87 indikator telah tercapai dengan hasil sangat baik. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai SPM RSUD Dolopo memenuhi dari target yang telah ditetapkan yaitu 96,67% dengan capaian 100%. Sedangkan untuk kinerja keuangan, capaian realisasi keuangan di RSUD Dolopo sebesar 100%. Hasil pengukuran ini akan menjadi catatan bagi pihak RSUD Dolopo untuk mendapatkan perbaikan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja RSUD Dolopo perlu diidentifikasi permasalahan yang ada dan merumuskan upaya pemecahan masalah sehingga visi dan misi RSUD Dolopo dapat tercapai.

B. SARAN

Guna mengatasi permasalahan dan meningkatkan pelayanan di RSUD Dolopo, maka dapat dilaksanakan beberapa langkah perbaikan, antara lain:

1. Meningkatkan mutu pelayanan dan Kepuasan Masyarakat di RSUD Dolopo sesuai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan standar akreditasi Rumah Sakit sehingga, tercapai layanan yang paripurna di dalam setiap melakukan pelayanan di rumah sakit melalui:
 - a. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit melalui program dan kegiatan yang ada.
 - b. Pemenuhan kekurangan Sumber Daya Manusia, baik jumlah maupun jenis tenaganya melalui beberapa cara yaitu melaksanakan rekrutmen pegawai non PNS BLUD, mengusulkan rekrutmen PNS dan menerima mutasi pegawai dari luar RSUD.

2. Meningkatkan cakupan jumlah karyawan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi masing – masing jenis tenaga melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan sehingga mutu pelayanan meningkat dan mampu bersaing dalam mengatasi tuntutan pelayanan kesehatan dimasa yang akan datang, mengingat perkembangan ilmu kedokteran terus berkembang dari tahun ke tahun dengan cara:
 - a. Menginventarisir kebutuhan Diklat masing – masing jenis tenaga dan mendata sertifikat yang perlu diperbahurui sehubungan sudah habis masa berlakunya;
 - b. Meningkatkan cakupan melalui *In House Training*.
3. Menjadikan nilai dan budaya organisasi sebagai dasar memberikan pelayanan serta meningkatkan kedisiplinan, kemampuan dan komitmen seluruh SDM untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien, sehingga mampu bersaing dalam mengatasi tuntutan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kompetensinya melalui program pendidikan dan pelatihan;
4. Melakukan koordinasi antar bidang dan lintas sektor serta evaluasi kinerja secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Dolopo dengan *stake holder* melalui kegiatan pertemuan dan audit;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat sebagai penerima layanan untuk memberikan sarana, pendapat, dan evaluasi terhadap pelayanan yang sudah diberikan melalui peran serta aktif dalam survey kepuasan masyarakat yang dilakukan serta turut mengawasi kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimal Rumah sakit yang telah ditetapkan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RSUD DOLOPO
KABUPATEN MADIUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berintegritas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. PURNOMO HADI

Jabatan : DIREKTUR RSUD DOLOPO KABUPATEN MADIUN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Jabatan : BUPATI MADIUN

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik periode per tahun maupun lima tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI MADIUN

H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Madiun, Januari 2022

Pihak Pertama,

DIREKTUR RSUD DOLOPO
KABUPATEN MADIUN

Dr. PURNOMO HADI

Pembina

NIP. 19750907 200902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

RSUD DOLOPO

KABUPATEN MADIUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya standar pelayanan minimal	Prosentase Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang dicapai	96,67 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 10.169.696.655,00	DAU
	- Peningkatan pelayanan BLUD	Rp. 81.113.000.000,00	BLUD
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
	- Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Rp. 1.200.000.000,00	DAK Fisik
	- Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp. 2.500.000.000,00	Dana Bagi Hasil
	- Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Rp. 1.660.847.188,00	DBHCHT
3	Program Peningkatan Sumber daya Manusia Kesehatan		
	- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Rp. 100.000.000,00	DAU
	JUMLAH	Rp. 96.743.543.843,00	

Pihak Kedua
BUPATI MADIUN

H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Madiun, Januari 2022

Pihak Pertama,
DIREKTUR RSUD DOLOPO
KABUPATEN MADIUN


Dr. PURNOMO HADI
 Pembina

NIP. 19750907 200902 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN-APBD TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOPO
KABUPATEN MADIUN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. PURNOMO HADI

Jabatan : DIREKTUR RSUD DOLOPO KABUPATEN MADIUN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Jabatan : BUPATI MADIUN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik periode per tahun maupun lima tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 20 Oktober 2022

Pihak Kedua
BUPATI MADIUN

H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Pihak Pertama,
DIREKTUR RSUD DOLOPO
KABUPATEN MADIUN



Dr. PURNOMO HADI
Pembina
NIP. 19750907 200902 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN-APBD TAHUN ANGGARAN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOPO
KABUPATEN MADIUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya standar pelayanan minimal	Prosentase Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang dicapai	96,67 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 11.550.946.659	DAU
	- Peningkatan pelayanan BLUD	Rp. 127.783.523.459	BLUD
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
	- Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp. 1.200.000.000	DAK
	- Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp. 37.530.000.000	PAD
	- Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp. 2.792.456.313	DBHCHT
3	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota		
	- Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Rp. 413.928.574	DAU
JUMLAH		Rp. 181.270.855.005	

Pihak Kedua
BUPATI MADIUN

H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Madiun, 20 Oktober 2022

Pihak Pertama,
DIREKTUR RSUD DOLOPO
KABUPATEN MADIUN



Dr. PURNOMO HADI

Pembina

NIP. 19750907 200902 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
INSPEKTORAT

Jl. MT. Haryono Telp. (0351) 453412
e-mail : inspektorat@madiunkab.go.id

CARUBAN

Nomor : 790/1763/402.060/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi
Implementasi SAKIP pada
RSUD Dolopo Kabupaten
Madiun Tahun 2021

Caruban, 1 Agustus 2022
Kepada
Yth. Sdr. Direktur RSUD Dolopo
di

MADIUN

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada RSUD Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum yang menjadi acuan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Bupati Madiun Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, dan
- 6) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Madiun Nomor 094/1592/402.060/2022 tanggal 15 Juli 2022

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP Perangkat Daerah dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

c. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Sasaran evaluasi adalah Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal Pemerintah Kabupaten Madiun dengan ruang lingkup:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk mencapai efektifitas dan efisiensi kinerja.
- 5) Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yakni dengan melakukan kombinasi atas metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kemanfaatannya

Dalam menilai pemenuhan suatu kriteria pada masing-masing OPD didasarkan pada fakta obyektif dan *professional judgement* dari para evaluator.

Teknik evaluasi yang digunakan antara lain:

- 1) Pengumpulan data dan informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada Perangkat Daerah.
- 2) Studi Dokumentasi, yang dilakukan dengan melihat pemenuhan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada website sakip.madiunkab.go.id dan dokumen lain yang menunjang.

f. Gambaran Umum Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 65 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun, RSUD Dolopo Kabupaten Madiun mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang spesifik di bidang pelayanan kesehatan. Untuk menjalankan tugas tersebut, RSUD Dolopo mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

RSUD Dolopo Kabupaten Madiun **sudah** menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2021 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Madiun Nomor 790/1534/402.060/2021 tanggal 3 September 2021 diantaranya dengan:

- 1) Menampilkan isu strategis terkait penambahan sasaran kualitas standar SPM RSUD Dolopo di tahun 2023 harus dijelaskan dalam Perubahan dokumen Perencanaan Strategik tahun 2021
- 2) Merevisi Target Indikator Kinerja Utama dalam dokumen Perencanaan Strategis.

2. Hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi kami sampaikan secara terperinci menunjukkan kategori **A** atau **memuaskan** dengan nilai sebesar **82,95**. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada RSUD Dolopo Kabupaten Madiun dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot		Nilai	
	2021	2022	Akuntabilitas Kinerja	
			2021	2022
a. Perencanaan Kinerja	30 %	30 %	24,17 %	29,46 %
b. Pengukuran Kinerja	25 %	30 %	20,31 %	25,29 %
c. Pelaporan Kinerja	15 %	15 %	13,30 %	11,32 %
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10 %	25 %	7,43 %	16,88 %
e. Capaian Kinerja (untuk Tahun 2021)	20 %		14,38 %	
J u m l a h	100 %	100 %	79,59 %	82,95 %

Beberapa catatan terkait dengan implementasi SAKIP di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun diantaranya:

- a) Dokumen evaluasi internal triwulan I tahun 2022 belum menyajikan data hambatan, rekomendasi, dan solusi atau langkah perbaikan ke depan yang diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja
- b) Belum menyajikan data perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai tahun 2021 pada dokumen laporan kinerja 2021.

3. Penutup

a. Simpulan

Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada keseluruhan komponen menunjukkan bahwa RSUD Dolopo Kabupaten Madiun telah memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Dolopo Kabupaten Madiun dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja kami memberikan rekomendasi penyempurnaan sebagai berikut:

- a) Menyajikan data hambatan, rekomendasi, dan solusi atau langkah perbaikan ke depan yang diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada dokumen evaluasi internal triwulan I tahun 2022
- b) Menyajikan data perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai tahun 2021 pada dokumen laporan kinerja 2021.

Demikian Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja dan bahan evaluasi Saudara. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun.



Drs. AGUS BUDI WAHYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620801 198203 1 006